

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur yang beralamatkan di Jl.Raya Bandung KM 1 Cianjur ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 17 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pengawasan berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif sesuai dengan aturannya guna mencapai tujuan organisasi. Sejalan itu pula pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan aparat pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi belajar dari kesalahan agar di kemudian hari tidak terulang kembali.

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur yaitu *“Terwujudnya sistem pengawasan yang professional dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju terwujudnya Cianjur yang lebih cerdas, sehat, sejahtera dan berahlakul karimah”*.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pengawasan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan keterampilan dan keahlian aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari objek pemeriksaan dan mencegah penyalahgunaan keuangan.
3. Meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur.
Tujuannya adalah untuk dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan kepada masyarakat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan.

Program dan Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :
 - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - 3) Inventarisasi Temuan Pengawasan
 - 4) Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa Aparatur Pengawasan
 - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Unsur-unsur Inspektorat Daerah adalah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c. Unsur Pelaksana yaitu Inspektur Pembantu, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mengoptimalisasikan fungsi pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 menyebutkan bahwa : Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah di desa yang terdiri dari pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengawasan terdiri atas :

- a. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi : kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- c. Pengawasan Lainnya meliputi : Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya harus mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antara pengawas intern pemerintah dan objek pemeriksaan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan aparat pengawas intern pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*) juga diperlukan perubahan (*mind set*) aparat pengawas intern pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi KKN. Objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten meliputi :

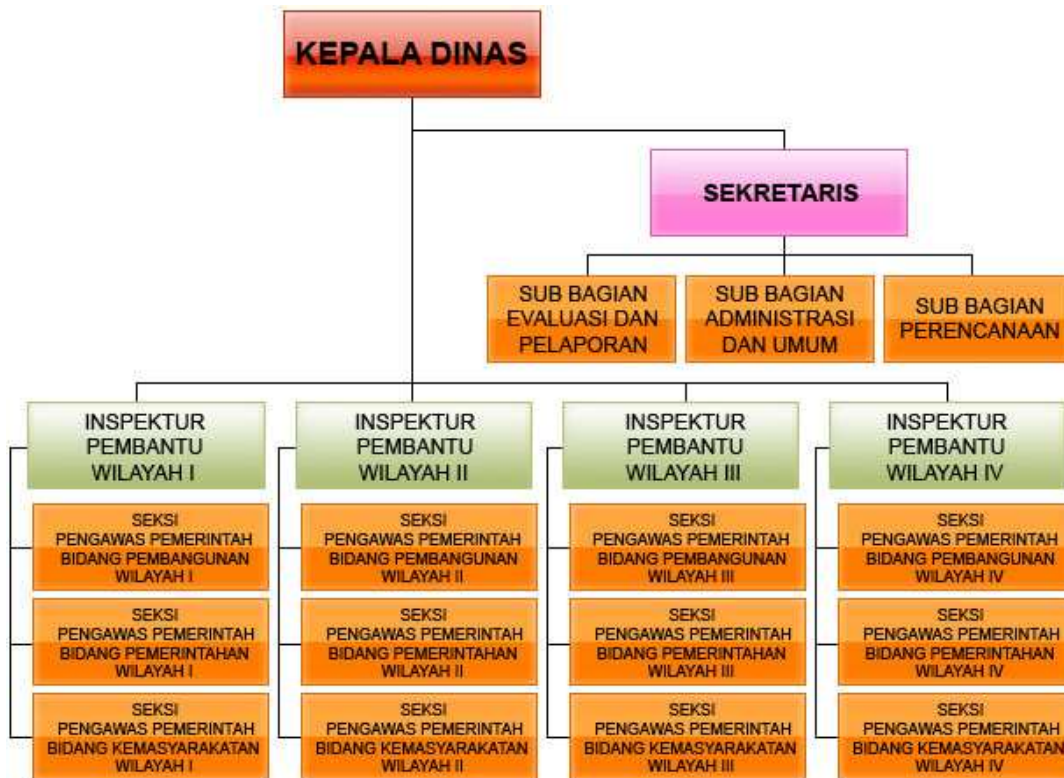
- a. Semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
- b. Perusahaan Daerah, apabila kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten
- c. Kecamatan
- d. Desa / Kelurahan
- e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa/Kelurahan

- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/join Laporan Keuangan Daerah Audit.

Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan antar aparat pengawas intern pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran. Objek pengawasan juga diselenggarakan melalui Pemeriksaan Serentak (Pemtak) yang dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pilkada dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah serta review laporan keuangan daerah.

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan serta mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk : tunjangan kelangkaan profesi, satuan biaya khusus bagi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan, penanganan kasus atau pengaduan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur



Gambar 4
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur dilingkungan inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawas
- 2) Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat fungsional pengawas daerah
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- 4) Penyusunan, penginventarisan, pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada : Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda, Bagian Pemerintahan Desa Setda, Bagian Hukum Setda, Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Setda, Kantor Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cijati, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Bojong Herang, Kecamatan Solok Pandan, Desa dalam Wilayah Kecamatan Naringgul, Sindang Barang, Kadupandak, Cijati, Cibeber, Sukaluyu, Cugenang dan Cianjur.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah I dibantu oleh :

- 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I
- 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I
- 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada : Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Kependidikan dan Pelatihan Daerah, Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Setda, Bagian Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Peternakan Setda, Bagian Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Setda, Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Setda, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pasir Kuda, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Pacet, Kecamatan Muka, Kecamatan Pamoyanan, Desa dalam Wilayah Kecamatan Cidaun, Sukanagara, Pagelaran, Tanggeung, Pasir Kuda, Ciranjang, Haurwangi dan Pacet.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah II dibantu oleh :

- 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II
- 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II
- 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada : Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Setda, Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Setda, Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Setda, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Akademi Keperawatan, Kecamatan Leles, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Campaka Mulya, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cikalongkulon, Kelurahan Sawah Gede, Desa dalam Wilayah Kecamatan Leles, Cibinong, Campaka Mulya, Campaka, Cilaku, Bojong Picung, Cipanas dan Cikalongkulon.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah III dibantu oleh :

- 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada : Sekretariat DPRD, Dinas Tata Ruang Permukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpajakan Daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan, Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah Setda, Bagian Kas dan Perbendaharaan Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Pengelolaan Aset dan Administrasi Umum Setda, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Takokak, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Mande, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Karangtengah, Kelurahan Sayang, Desa dalam Wilayah Kecamatan Agrabinta, Cikadu, Takokak, Gekbrong, Warung Kondang, Mande, Sukaresmi dan Karang Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah IV dibantu oleh :

- 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV
- 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV
- 3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional, pada Inspektorat dapat dibentuk Jabatan Fungsional dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2 Uji Validitas

Dalam penelitian yang menggunakan instrumen maka instrumen penelitian tersebut harus memiliki syarat valid dan reliabel. Untuk melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap instrumen kuesioner yang digunakan.

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menguji validitas dapat digunakan nilai koefisien korelasi melalui perhitungan *product moment* dengan bantuan program SPSS versi 17.0 *for windows*.

Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pernyataan dengan skor total, selanjutnya interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan, bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3 maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik atau dinyatakan valid.

Dari hasil seperti yang diperoleh pada lampiran tabel 1, dalam tabel tersebut terlihat hasil bahwa untuk kuesioner variabel Pengalaman Kerja (X1) dari tujuh item pertanyaan lima diantaranya dinyatakan valid yaitu item pertanyaan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7. Sedangkan untuk dua item pertanyaan dinyatakan tidak valid karena nilai koefisien korelasinya < 3 , yaitu item pertanyaan nomor 1 dan 5. Untuk perhitungan selanjutnya maka item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan.

Untuk uji validitas variabel selanjutnya yaitu Independensi (X2) dapat dilihat pada lampiran tabel 2. Dalam tabel tersebut nampak bahwa tujuh dari delapan item pertanyaan dinyatakan valid, yaitu item pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Dan satu dari delapan item pertanyaan pada kuesioner variabel ini dinyatakan tidak valid karena hanya memiliki nilai korelasi sebesar $0,245 < 3$ yaitu item pertanyaan nomor 3. Maka item yang tidak valid tersebut dibuang dan tidak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya.

Dan uji validitas untuk variabel Kualitas Hasil Audit (Y) terdapat pada tabel 3, dalam tabel tersebut diperlihatkan bahwa delapan dari sepuluh item pertanyaan dinyatakan valid yaitu item pertanyaan nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sedangkan dua item dinyatakan tidak valid karena nilai koefisien korelasi yang kurang dari 0,3 yaitu item pertanyaan nomor 4 dan 10.

4.1.3 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi lebih dari sekali. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Konsep reliabilitas ini erat kaitannya dengan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau tidak.

Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien *Alpha Cronbach's*. Koefisien ini merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala Likert sehingga koefisien ini merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Perhitungan uji reabilitas ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17.00. Dimana hasil dari perhitungan *Alpha Cronbach's* tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha yang dihasilkan member nilai Alpha > 0,60.

Untuk variabel Pengalaman Kerja (X1) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* sebesar 0,753 maka kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena > 0,60. Tampak pada hasil perhitungan dengan program SPSS berikut ini :

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

Kemudian untuk variabel Independensi (X2) dari hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh nilai sebesar 0,703 dan sesuai dengan ketentuan dinyatakan reliabel. Seperti yang tampak pada hasil perhitungan berikut :

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	8

Dan untuk variabel Kualitas Hasil Audit (Y) dari hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar $0,720 > 0,60$ maka dinyatakan reliabel. Seperti tampak pada hasil perhitungan SPSS berikut ini :

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	9

4.1.4 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.4.1. Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja adalah pengalaman auditor dalam melakukan tugas audit. Pengalaman kerja ini dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan selama menjadi auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang mewakili setiap variabel yang diteliti. Dalam kuesioner untuk variabel

Pengalaman Kerja (X1) terdapat tujuh item/pertanyaan yang disebarkan kepada 16 responden yaitu auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur. Hasil jawaban kuesioner untuk variabel Pengalaman Kerja (X1) dapat dilihat pada lampiran tabel 1.

Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung banyaknya jawaban yang muncul dari setiap pertanyaan, lalu dilanjutkan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Dan untuk menjaga keakuratan dan keobjektifan data maka skoring pada jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu skoring positif dan skoring negatif. Untuk skoring pada pertanyaan positif tidak dilakukan perubahan dimana angka skor sesuai dengan urutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka skor yang telah ada dapat dianalisa sebagai berikut :

Tabel 4.1
Skoring Positif Variabel Pengalaman Kerja (X1)

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5	4	3	2	1		
2	9	3	4	0	0	69	80
3	4	7	4	1	0	62	80
Jumlah						131	160

Sumber : data diolah

Kemudian untuk pertanyaan negatif skor yang ada dibalik nilainya, yaitu :

1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Skoring Negatif Variabel Pengalaman Kerja (X1)

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5=1	4=2	3=3	2=4	1=5		
4	1	0	13	0	2	50	80
6	1	2	10	1	2	49	80
7	8	3	4	0	1	31	80
Jumlah						130	240

Sumber : data diolah

Jumlah skor yang diperoleh dari penyebaran kuesioner untuk variabel Pengalaman Kerja (X1) ini adalah sebesar 261 (131+130) dengan skor maksimal 400 (160+240) berdasarkan data tersebut tingkat Pengalaman Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dapat dihitung dengan cara membandingkan antara skor jawaban yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara perhitungannya :

$$(261 : 400) \times 100\% = 65,25\%$$

Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan tabel interpretasi skor sebagai berikut :

Tabel 4.3
Interpretasi Skor

Hasil	Kategori
20% - 35,99%	Tidak Baik / Tidak Efektif
36% - 51,99%	Kurang Baik / Kurang Efektif
52% - 67,99%	Cukup Baik / Cukup Efektif
68% - 83,99%	Baik / Efektif
84% - 100%	Sangat Baik / Sangat Efektif

Sumber : Sugiyono (2009)

Menurut tabel di atas angka 65,25% berada pada kisaran 52% - 67,99% yang memiliki kategori Cukup Baik/Cukup Efektif. Sehingga dapat diartikan bahwa pengalaman kerja yang dimiliki auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai cukup baik.

4.1.4.2. Independensi

Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakannya. Independensi ini tercermin dari sikap independennya dalam menyusun program/perencanaan, melaksanakan serta melaporkan hasil audit.

Dari data hasil penyebaran kuesioner untuk variabel Independensi (X2) diperoleh hasil seperti pada lampiran tabel 2. Dalam kuesioner untuk variabel Independensi (X2) ini terdapat delapan pertanyaan yang respondennya masih sama dengan variabel sebelumnya yaitu seluruh auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

Kemudian data yang berupa hasil jawaban dari kuesioner ini dianalisis dengan cara yang masih sama dengan variabel sebelumnya yaitu menghitung jumlah jawaban yang muncul untuk selanjutnya dihitung rata-rata jawaban dan membandingkannya dengan jawaban berdasarkan skoring yang telah ditentukan berupa skoring untuk pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Berdasarkan skor yang diperoleh tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Tabel 4.4
Skoring Positif Variabel Independensi (X2)

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5	4	3	2	1		
2	3	2	5	1	5	45	80
4	5	0	4	3	4	47	80
6	3	1	3	4	5	41	80
7	1	1	5	3	6	42	80
Jumlah						175	320

Sumber : data diolah

Kemudian untuk pertanyaan negatif skor yang ada dibalik nilainya, yaitu : 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Dengan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Skoring Negatif Variabel Independensi (X2)

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5=1	4=2	3=3	2=4	1=5		
1	1	1	4	4	6	61	80
5	0	0	3	3	10	71	80
8	0	0	4	3	9	69	80
Jumlah						201	240

Sumber : data diolah

Jumlah skor yang diperoleh dari penyebaran kuesioner untuk variabel Independensi (X2) ini adalah sebesar 376 (175+201) dengan skor maksimal 560 (320+240), berdasarkan data tersebut tingkat Independensi auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dapat dihitung dengan cara membandingkan antara skor jawaban yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara perhitungannya

:

$$(376 : 560) \times 100\% = 67,14\%$$

Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan tabel interpretasi skor (tabel 4.3), angka 67,14% berada pada kisaran 52% - 67,99% yang memiliki kategori Cukup Baik/Cukup Efektif. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa independensi yang dimiliki auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai cukup baik.

4.1.4.3. Kualitas Hasil Audit

Kualitas Hasil Audit adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan adalah standar pelaksanaan audit kinerja dan standar pelaporan audit kinerja yang diterbitkan oleh BPKP.

Seperti pada penelitian variabel Pengalaman Kerja (X1) dan Independensi (X2), penelitian untuk variabel Kualitas Hasil Audit (Y) pun dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur. Setelah mengetahui bagaimana kondisi pengalaman kerja dan independensi pada instansi tersebut selanjutnya untuk mengetahui kondisi kualitas hasil audit dilakukan cara yang sama dengan perhitungan variabel sebelumnya.

Dalam kuesioner untuk variabel Kualitas Hasil Audit (Y) ini terdiri dari sepuluh item pertanyaan dan untuk distribusi jawabannya dapat dilihat di lampiran pada tabel 3. Dan setelah diperoleh hasil berupa jawaban dari responden selanjutnya dilakukan perhitungan sama seperti langkah perhitungan variabel sebelumnya.

Berikut tabel analisis jawaban berdasarkan skoring untuk variabel kualitas hasil audit :

Tabel 4.6
Frekuensi Skoring Positif Variabel Kualitas Hasil Audit

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5	4	3	2	1		
1	7	3	5	1	0	64	80
2	3	2	5	4	2	48	80
3	10	3	2	1	0	70	80
5	10	4	2	0	0	72	80
6	14	1	1	0	0	77	80
9	9	3	3	1	0	68	80
Jumlah						399	480

Sumber : data diolah

Kemudian untuk pertanyaan negatif skor yang ada dibalik nilainya, yaitu :
1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Frekuensi Skoring Negatif Variabel Kualitas Hasil Audit

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5=1	4=2	3=3	2=4	1=5		
7	3	2	3	3	5	53	80
8	2	2	4	5	3	53	80
Jumlah						106	160

Sumber : data diolah

Jumlah skor yang diperoleh dari penyebaran kuesioner untuk variabel Kualitas Hasil Audit (Y) adalah sebesar 505 (399+106) dengan skor maksimal 640 (480+160), jadi berdasarkan hasil tersebut maka tingkat kualitas hasil audit para auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dapat dihitung dengan cara membandingkan antara skor jawaban yang didapat dengan skor maksimal.

Berikut ini adalah cara perhitungannya :

$$(505 : 640) \times 100\% = 78,91\%$$

Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan tabel interpretasi skor (tabel 4.3), angka 78,91% berada pada kisaran 68% - 83,99% yang termasuk dalam kategori Baik/Efektif. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa independensi yang dimiliki auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai baik.

4.1.5 Analisis Korelasi *Rank Spearman*

Tahap pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit serta menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada Bab I. Data hasil perhitungan kuesioner variabel pengalaman kerja, independensi, dan kualitas hasil audit adalah data yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis ini secara statistik, dimana hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun teknik statistik yang digunakan adalah korelasi *Rank Spearman* untuk mengetahui hubungan antara variabel pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit. Dan untuk mengetahui pengaruh serta besarnya pengaruh variabel pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas hasil audit digunakan perhitungan koefisien determinasi.

Berikut uji korelasi *Rank Spearman* dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.00 *for window* :

Correlations

			X1	X2	Y
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.362	.599*
		Sig. (2-tailed)	.	.169	.014
		N	16	16	16
	X2	Correlation Coefficient	.362	1.000	.118
		Sig. (2-tailed)	.169	.	.662
		N	16	16	16
	Y	Correlation Coefficient	.599*	.118	1.000
		Sig. (2-tailed)	.014	.662	.
		N	16	16	16

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi untuk variabel Pengalaman Kerja (X1) sebesar 0,599 dan untuk nilai korelasi Independensi (X2) adalah sebesar 0,118.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh tersebut maka digunakan koefisien determinasi dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,717)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 51,41 \%$$

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja (X1) yang memiliki indikator yaitu lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Secara keseluruhan pengalaman kerja yang dimiliki auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai baik. Ini

dapat dilihat dari tanggapan responden berupa jawaban yang mereka hasilkan yang menyatakan bahwa dengan lamanya bekerja sebagai auditor dapat lebih mengetahui informasi relevan yang dibutuhkan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian, auditor lebih dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi, mencari penyebabnya serta memberikan rekomendasi untuk menghilangkan/memperkecil terjadinya kesalahan tersebut. Serta selalu teliti dan cermat meskipun banyak tugas yang dihadapi.

Dari hasil perhitungan korelasi yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh nilai korelasi *Rank Spearman* (ρ) sebesar 0,599 untuk variabel Pengalaman Kerja (X1), ini berarti variabel pengalaman kerja memiliki hubungan positif dengan variabel kualitas hasil audit. Dan jika dibandingkan dengan tabel 3.2 Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi nilai tersebut berada pada kisaran 0,40 – 0,599 dan termasuk pada kategori sedang. Maka dapat diartikan bahwa variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh positif dengan tingkat keeratan hubungan sedang dengan kualitas hasil audit. Maka untuk variabel pengalaman kerja ini H_a diterima dan H_o ditolak. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ika Sukriah et al (2009), Christiawan (2009) dan Alim et al (2009) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian semakin banyak pengalaman kerja maka semakin meningkat atau semakin baik pula kualitas hasil audit yang dilakukan.

4.2.2 Independensi

Selanjutnya untuk variabel X2 (Independensi) yang dimiliki auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dinilai baik. Ini tampak dari jawaban responden yang dapat disimpulkan bahwa mereka independen dalam perencanaan/penyusunan program dimana responden atau auditor bebas dari intervensi pimpinan ketika menentukan prosedur audit yang dipilih. Kemudian independen dalam pelaksanaan dimana responden atau auditor bebas dari usaha-usaha objek pemeriksaan untuk menunjuk bagian yang diperiksa serta dalam penugasannya bebas dari kepentingan pribadi, organisasi maupun pihak lain. Dan independen dalam pelaporan yang dapat dilihat bahwa responden atau auditor dalam pelaporannya bebas dari usaha pihak lain untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksaan terhadap isi laporan.

Dan untuk hasil perhitungan variabel independensi diperoleh hasil sebesar 0,118 ini juga menunjukkan bahwa variabel independensi memiliki hubungan positif dengan variabel kualitas hasil audit walaupun hanya memiliki keeratan hubungan sangat rendah karena berada pada kisaran 0,00 – 0,199 yang termasuk pada kategori sangat rendah. Maka untuk uji hipotesisnya pun H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan kata lain hipotesis yang diajukan yaitu Independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit terbukti meskipun hanya memiliki nilai keeratan hubungan yang sangat rendah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alim *dkk* (2007) yang menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Shockley, De Angelo, Knapp, Deis dan Giroux , Mayangsari (dalam Ika Sukriah :18).

4.2.3 Pengaruh Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Hasil

Audit

Selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dapat dilihat dengan menggunakan koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan menunjukkan sebesar 51,41% kualitas hasil audit dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan independensi. Sedangkan sisanya 48,59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.